

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MARAKNYA MURAL KRITIKAN TERHADAP PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI DI MEDIA TEMPO.CO DAN MEDIA INDONESIA (PERIODE 12 AGUSTUS - 01 SEPTEMBER 2021)

Ananda Bintang Iftakhurizaq

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
ananda.18047@mhs.unesa.ac.id

Awang Dharmawan

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
awangdharmawan@unesa.ac.id

Abstrak

Peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuangkan ekspresi keresahan akibat krisis pandemi covid-19 disikapi oleh aparat dengan penghapusan mural hingga pemanggilan pembuat mural karena berbagai alasan. Menurut banyak pihak, reaksi aparat dalam menghapus mural dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan asas kebebasan berekspresi di Indonesia. Media sebagai salah satu pilar demokrasi berperan untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan, sehingga penting untuk melihat perannya dalam proses pemberitaan peristiwa maraknya aksi mural yang diwarnai dengan penghapusan mural oleh aparat. Namun banyak sekali kepentingan yang memengaruhi pemberitaan suatu media, salah satunya adalah kepentingan kepemilikan media. Oleh karena itu, media Tempo.co dan Media Indonesia dipilih sebagai subjek penelitian untuk membandingkan pembingkai pemberitaan dalam peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi. Untuk melihat realitas di balik wacana dari media massa, digunakan analisis framing dengan model yang dicetuskan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasilnya ditemukan bahwa kedua media membingkai peristiwa tersebut dengan kepentingan masing-masing media. Tempo.co membingkai peristiwa tersebut dengan keberpihakannya terhadap aksi mural oleh masyarakat. Sedangkan Media Indonesia cenderung membingkai peristiwa dengan mengglorifikasi penghapusan mural.

Kata kunci: Framing, Media, Mural, Tempo.co, Media Indonesia

Abstract

The incident of the rise of murals criticizing the government during the pandemic carried out by the public to express unrest due to the COVID-19 pandemic crisis was responded to by the authorities by removing murals and summoning mural makers for various reasons. According to many parties, the reaction of the apparatus in removing murals is considered a form of backwardness to democracy and the principle of freedom of expression in Indonesia. The media as one of the pillars of democracy plays a role in supervising power, so it is important to see its role in the reporting process of the rampant mural action which was marked by the removal of murals by the authorities. However, there are many interests that affect the reporting of a media, one of which is the interest of media ownership. Therefore, the media Tempo.co and Media Indonesia were chosen as research subjects to compare the framing of the news in the incident of the rise of murals criticizing the government during the pandemic. To see the reality behind the discourse of the mass media, framing analysis is used with the model proposed by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. The results found that both media framed the event with the interests of each media. Tempo.co framed the event by taking sides with the mural action by the community. Meanwhile, Media Indonesia tends to frame events by glorifying the removal of murals.

Keywords: Framing, Media, Mural, Tempo.co, Media Indonesia

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020. Krisis akibat pandemi covid-19 membuat banyak sektor terimbas dampaknya. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perekonomian yang kian terpuruk.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan Maret 2021 berada di angka 10.14% atau sekitar 27.54 juta merupakan penduduk Indonesia berstatus miskin, angka yang tinggi bila dibandingkan dengan sebelum masa pandemi. Banyaknya populasi usia produktif yang terinfeksi hingga meninggal dunia akibat Covid-19 menjadi salah satu alasan mengapa angka kemiskinan di masa pandemi menjadi tinggi. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah guna meminimalisir angka penyebaran Covid-19 juga menyebabkan kondisi perekonomian tidak dapat beroperasi sepenuhnya, hingga menyebabkan banyak pekerja yang terpaksa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi masih terdapat bantuan sosial yang belum merata di beberapa wilayah. Pemerintah juga dianggap tidak mampu mencegah penularan covid-19 secara signifikan, hingga membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penularan dan kematian yang tinggi. Hal inilah yang disinyalir membuat banyak sekali bermunculan berbagai macam bentuk kritikan terhadap Pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dalam bentuk mural. Mural kritikan yang bermunculan pun juga banyak mengandung kritik dan ungkapan mengenai krisis ekonomi yang sedang dirasakan oleh masyarakat.

Namun bermunculannya mural direspon oleh aparat dengan melakukan penghapusan mural karena berbagai alasan, seperti dianggap mengganggu ketertiban umum dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Tindakan penghapusan mural oleh aparat pun menjadi

persoalan yang serius karena disinyalir sebagai bentuk kemunduran dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, di mana kebebasan berekspresi seharusnya menjadi salah satu semangat dan esensi akan keberlangsungan demokrasi di Indonesia (Selian & Melina, 2018).

Peristiwa bermunculannya mural kritikan di berbagai daerah pada masa pandemi tentu menjadi topik yang banyak diperbincangkan dan membanjiri berbagai portal berita. Dilansir dari CNN Indonesia, salah satu mural yang mengawali serangkaian maraknya mural di masa pandemi berada di Kota Tangerang. Mural tersebut memperlihatkan wajah mirip presiden Joko Widodo dengan bagian matanya yang ditutup dengan tulisan *"404 not found"*, yang juga menjadi topik perbincangan di media sosial. Selain dihapus, pembuat mural *"404 not found"* juga diburu oleh aparat untuk dimintai keterangan terkait maksud dan tujuan pembuatan mural, karena aparat menganggapnya sebagai tindakan provokatif dan penghinaan terhadap lambang negara. Sejak saat itulah kemudian bermunculan mural lain yang membawa tema serupa di berbagai wilayah, seperti mural bertuliskan *"Dipaksa sehat di negara yang sakit"* di Pasuruan, Jawa Timur yang juga dihapus oleh aparat, dan masih banyak lagi mural yang dihapus oleh aparat di berbagai daerah lainnya (CNN Indonesia).

Sebagai salah satu seni jalanan, mural merupakan seni yang dikerjakan oleh seorang seniman dengan memanfaatkan ruang publik sebagai tempat dan media yang digunakan untuk menampilkan karyanya, sehingga dapat dilihat oleh khalayak luas dari jalan yang mereka lalui. Kehadiran mural pada umumnya digunakan sebagai bentuk ekspresi yang mengandung kritik sosial hingga respon dari masyarakat akan ketidakpuasan terhadap kebijakan dan pemerintah. Ruang publik merupakan suatu ruang atau tempat yang bertindak sebagai perantara masyarakat dengan kekuasaan/pemerintah, di mana khalayak mengorganisasi dirinya dan di mana opini khalayak dapat terbentuk (Barker, 2006). Munculnya mural di berbagai ruang publik

mengindikasikan usaha masyarakat dalam melakukan kritik protes terhadap kekuasaan (Wicaksono, 2002).

Ketertarikan peneliti dalam menjadikan peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemic sebagai objek penelitian tentu memiliki alasan. Mural kritikan yang dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi seharusnya menjadi hal yang dilindungi di Indonesia sebagai negara demokrasi. Namun respon aparat dalam menanggapi bermunculannya mural kritikan terhadap pemerintah dengan melakukan penghapusan mural disinyalir menjadi sebuah bentuk pembungkaman dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana media massa Tempo.co dan Media Indonesia dengan segala latar belakang media masing-masing dalam memandang dan mengkonstruksi isu ancaman kebebasan berekspresi dalam peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi.

Di era globalisasi saat ini, pesatnya kemajuan tren jurnalistik dalam jaringan (daring) membawa banyak manfaat bagi khalayak pembaca karena akses kecepatan dan penyebarannya yang begitu cepat. Apalagi saat ini media dianggap memiliki peran utama karena media disebut sebagai medium perantara dan pilar dalam implementasi demokrasi di seluruh dunia (Castells, 2014). Sehingga masyarakat kini memilih media massa berbasis online sebagai rujukan dalam mencari berita dan informasi karena kemudahan akses yang ditawarkan, serta penyebarannya yang begitu cepat dan masif.

Dalam mengabadikan suatu peristiwa menjadi berita, media massa tentu seharusnya menerapkan independensi dalam pemberitaannya, artinya ketika media memproduksi produk jurnalistik atau berita, media tidak mendapatkan intervensi dari siapapun dan mewujudkan independensi di dalam ruang redaksi dalam menciptakan produk jurnalistik (Kusumastuti, et al., 2020). Namun tak dapat dipungkiri jika banyak aspek yang akan memengaruhi media

massa dalam memproduksi pemberitaannya, baik pengaruh internal maupun eksternal.

Media massa seringkali dijuluki sebagai "*the fourth estate*" atau kekuatan keempat dalam struktur kenegaraan, karena peran media yang memiliki kekuatan dan keterkaitan dalam aspek sosial-ekonomi dan politik (Schultz, 1998). Julukan tersebut kemudian menegaskan jika media massa dapat memiliki dua posisi, di mana media massa mampu menghadirkan pengaruh positif maupun negatif bagi masyarakat.

Eksistensi media massa memiliki kaitan erat dengan sektor ekonomi yang juga membuatnya bersinggungan dengan sistem politik. Pada praktiknya, media massa memang merupakan bagian dari industri dan bisnis yang tentu orientasinya adalah profit, mengingat untuk mendirikan perusahaan media tentu membutuhkan modal dan sumber daya yang besar. Sehingga kepemilikan media sebagian besar dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai pebisnis dan pemodal yang bahkan tak jarang juga berasal dari lingkaran politik praktis. Sektor media massa berjalan berdasarkan sistem bisnis, karena kehidupan dan kepemilikan media berjalan dan dikuasai oleh para pebisnis yang merancang, menjalin kerja sama, hingga membangun agregasi grup media (Severin, 2007).

Berbagai pengaruh tersebut membuat media massa menjadi aktor utama dalam proses pembingkaiannya suatu berita, di mana salah satu cara yang digunakan adalah penggunaan retorika dalam teks berita yang dapat mengubah persepsi publik mengenai suatu peristiwa (Baum & Potter, 2008). Secara singkat, konsep framing atau pembingkaiannya media adalah cara-cara yang dilakukan oleh media massa untuk membingkai dan mengkonstruksi ulang suatu realitas dari suatu peristiwa di dalam teks berita. Framing atau pembingkaiannya media dilakukan dengan tujuan untuk menggiring hingga mengubah opini dan persepsi publik akan suatu peristiwa. Proses konstruksi oleh media dimulai dengan proses pembingkaiannya realitas, yang kemudian

menghasilkan gagasan bahwa realitas dikonstruksi dan ditafsirkan menggunakan makna dan pendekatan tertentu (Kriyantono, 2014).

Fokus pembingkai berita dari sisi jurnalis telah menjadi rutinitas di ruang redaksi yang semuanya membentuk bagaimana pembingkai suatu sumber atau peristiwa dipilih dan diproses menjadi teks berita (D'Angelo & Kuypers, 2010).

Berdasarkan dua riset terdahulu mengenai rekam jejak media Tempo.co yang telah penulis kumpulkan, media Tempo.co dalam pemberitaannya dapat dikatakan cukup kritis dan objektif kaitannya dengan pemberitaan tentang kebijakan oleh pemerintah. Pada penelitian yang berjudul "Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah dalam menangani Kasus covid-19", terdapat kesimpulan bahwa dalam proses pembingkai pemberitaan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus covid-19, media Tempo.co bersikap kritis dengan menghadirkan pemberitaan yang menunjukkan keraguan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu menangani kasus covid-19 di Indonesia (Sofian & Lestari, 2021). Tempo.co juga dikenal memiliki independensi dalam ruang redaksi, sehingga pemberitaannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan kepemilikan media (Nurhajati & Wijayanto, 2019). Selain itu, rekam jejak Tempo.co dikenal sebagai salah satu media yang cukup kritis terhadap kekuasaan. Majalah Tempo pernah dibredel oleh rezim Soeharto pada tahun '90an karena memuat pemberitaan yang membahas indikasi dan gelagat adanya korupsi dalam transaksi pembelian kapal perang yang mana pemberitaan tersebut dianggap oleh pemerintah mengganggu stabilitas negara hingga pada akhirnya Tempo kembali terbit setelah Soeharto lengser (Tempo, 2013). Sedangkan pada penelitian lain yang berjudul "Analisis framing Pemberitaan Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)" menunjukkan jika media Tempo.co sejalan dengan pemerintah dengan menghadirkan pemberitaan yang menyetujui langkah pemerintah dalam membubarkan ormas

HTI sebagai bentuk objektifitas yang ditunjukkan oleh Tempo.co (Azzahro & Dewi, 2018).

Berdasarkan riset terdahulu yang meneliti analisis framing dengan subjek portal berita Media Indonesia, dalam pemberitaannya cenderung sejalan dengan pemerintah. Seperti dalam penelitian berjudul "Analisis framing pemberitaan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia" di mana Media Indonesia sejalan dengan pemerintah dalam hal pembubaran ormas HTI (Syifa, 2017). Pada penelitian yang kedua yang berjudul "Perbandingan Berita Headline Calon Presiden Joko Widodo Pada Koran Harian Nasional Kompas dan Koran Harian Nasional Media Indonesia" juga menunjukkan jika pemberitaan di Media Indonesia cenderung memberikan citra baik kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, dimana pada saat itu Joko Widodo adalah capres yang berstatus petahana (Idris & Ilyas, 2020). Meskipun seiring perkembangannya Media Indonesia menjadi dekat dengan pemerintah karena pemiliknya adalah seorang politisi yang tentunya mengikuti arus politik yang sarat akan kepentingan, tetapi di era orde baru Surya Paloh merupakan salah satu tokoh yang juga cukup vocal terhadap pemerintah. Surya Paloh pada saat itu pernah menuntut Menteri Penerangan untuk mencabut Permen No. 01/1984 yang dianggap membatasi kebebasan pers di Indonesia. Oleh karena itu, Media Indonesia dengan segala latar belakangnya menarik minat peneliti untuk menjadikannya sebagai subjek penelitian dan membandingkannya dengan media Tempo.

Untuk memahami sudut pandang informasi yang diambil oleh media Tempo.co dan Media Indonesia dalam pemberitaan mengenai isu ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang ada dalam peristiwa maraknya mural kritikan terhadap Pemerintah pada masa pandemi dengan berbagai latar belakang kedua media yang mungkin akan memengaruhi pemberitaan, dibutuhkan suatu analisis tersendiri terhadap berbagai aspek pemberitaan agar dapat diketahui latar belakang, konstruksi, maupun keberpihakan media. Salah satu metode untuk menganalisis

berita di media adalah dengan menggunakan teori analisis framing. Analisis framing adalah suatu pendekatan untuk menganalisis wacana berita terutama berkaitan dengan bagaimana wacana publik tentang suatu isu dibangun oleh media (Pan & Kosicki, 1993).

Media mengkonstruksi atau menceritakan suatu berita digambarkan pada cara melihat realitas suatu peristiwa yang dijadikan berita, sehingga hasil dari konstruksi realitas oleh media dipengaruhi oleh perspektif media melihat suatu peristiwa. Analisis framing memiliki dua aspek utama. Pertama, bagaimana media memaknai suatu peristiwa. Aspek tersebut berkaitan dengan elemen apa saja dari suatu peristiwa yang ingin diliput oleh media dan elemen apa yang tidak ingin diliput oleh media. Kedua, bagaimana media menulis fakta, bagaimana media memilih dan menggunakan kata, kalimat, serta gambar untuk mendukung gagasannya dalam produk berita yang dihasilkan (Eriyanto, 2002).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami aspek keberpihakan, perspektif, dan mengetahui cara yang digunakan oleh media Tempo.co dan Media Indonesia dalam membingkai pemberitaan maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Pada penelitian kualitatif, laporan dan penelitian yang dilakukan berbasis analisis dan laporan data, yang kemudian diinterpretasikan dalam laporan penelitian secara rinci (Cresswell, 2007). Peneliti akan mencoba menginterpretasi pemberitaan maraknya mural kritikan terhadap pemerintah di masa pandemic pada media Tempo.co dan Media Indonesia periode 12 Agustus 2021 – 01 September 2021.

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing yang dicetuskan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis framing juga termasuk dalam paradigma konstruktivisme, yang

memiliki pandangan bahwa bahasa tidak lagi sekedar dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk memahami realitas objektif dan dipisahkan dari subjek. Justru paradigma konstruktivisme berpandangan jika subjek (komunikant) bertindak sebagai faktor utama dalam kegiatan komunikasi Media sebagai komunikant dalam kegiatannya memiliki kaitan yang erat dengan pandangan konstruktivisme. Media massa sangat mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang dan melabeli suatu peristiwa, dan hal tersebut dapat diamati dari bagaimana media melakukan pembingkai dan mengkonstruksi suatu peristiwa yang kemudian diwujudkan dalam teks berita. Fakta dari teks berita yang dibuat oleh media bersifat relatif, tergantung konteks tertentu. Artinya setiap berita yang sampai ke khalayak pembaca sebenarnya telah melewati proses konstruksi dan pembingkai oleh media massa. Maka dari itu, sebenarnya media telah membentuk suatu realitas dari hasil konstruksi terhadap realitas pada suatu berita sejak berita tersebut tayang dan diakses oleh khalayak (Bungin, 2006). Realitas sosial merupakan sebuah kondisi yang bersifat relatif dan fleksibel, karena dapat dengan mudah berubah tergantung proses komunikasi manusia sehari-hari (Mulyana, 2006).

Penelitian ini menggunakan model analisis framing yang dicetuskan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mendefinisikan bahwa *framing* atau pembingkai merupakan sebuah proses media dalam merancang suatu realitas dengan menonjolkan pesan tertentu, memberikan porsi suatu informasi dengan kadar yang lebih banyak daripada yang lain sehingga akan membuat khalayak hanya terfokus pada pesan dan informasi tersebut (Eriyanto, 2002). Analisis framing model Pan dan Kosicki memiliki empat struktur yang akan membangun tema tertentu yang saling berhubungan dalam sebuah konstruksi pemberitaan. Empat struktur tersebut yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tempo.co

Berikut merupakan hasil penelitian pemberitaan Tempo.co terkait maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi periode 14 Agustus – 01 September 2021 yang diklasifikasikan menjadi empat kategori.

Tempo.co menggunakan narasumber yang kontra terhadap tindakan penghapusan mural oleh aparat

Ditinjau dari struktur sintaksisnya, kategori yang terdiri dari 5 berita yang diterbitkan oleh Tempo.co ini menonjolkan narasumber yang berasal dari akademisi hingga tokoh dan partai politik yang kontra terhadap tindakan penghapusan mural oleh aparat. Tempo.co terlihat menonjolkan hal tersebut dengan cara menuliskan identitas narasumber beserta kutipan wawancara yang memuat unsur kritik terhadap penghapusan mural oleh aparat pada judul berita. Tujuannya jelas untuk meyakinkan pembaca atas opini yang mereka sampaikan. Berita pertama berjudul “Aparat Hapus Mural Kritik Sosial, Sosiolog: Bentuk Baru Represi” dengan narasumber Ubedillah Badrun, seorang sosiolog yang memiliki rekam jejak sebagai aktivis 98. Kemudian berita berjudul “Wajah di Mural 404 Not Found, Roy Suryo: Kemiripan di Bawah 70 Persen” dengan narasumber Roy Suryo, mantan menteri di era SBY yang dikenal kontroversial. Berita ketiga berjudul “Aparat Hapus Mural, Demokrat: Ingat Ini Negeri Demokrasi, Bukan Otoriter” dimana Tempo.co terlihat sengaja memilih partai Demokrat yang merupakan partai oposisi pemerintah saat ini sebagai narasumber. Berita keempat berjudul “Mural dan Kritik di Ruang Publik, Begini Kata Dosen Komunikasi Unair”. Berita terakhir berisi pernyataan Kabareskrim yang menghimbau anggotanya untuk tidak menindas mural dengan judul berita “Kabareskrim Minta Polisi Tak Agresif Hadapi Pembuat Mural Kritik Pemerintah”.

Secara struktur skrip, Tempo menonjolkan unsur *who*, yaitu sosok narasumber yang dipilih oleh Tempo.co ditonjolkan identitasnya sebagai

sosok yang kontra dengan penghapusan mural. Beberapa narasumber tersebut juga memiliki rekam jejak yang cukup kritis terhadap pemerintah. sekaligus kutipannya yang bernuansa kritik terhadap penghapusan mural oleh aparat sejak dari judul berita.

Pada struktur tematik, Tempo.co memberikan sorotan utama terhadap pernyataan narasumber sebagai topik utama dalam berita, dengan penjelasan oleh Tempo.co untuk menjembatani antar pernyataan narasumber. Namun dalam beberapa berita, Tempo.co juga menghadirkan kutipan pernyataan narasumber yang berasal dari pihak yang berkuasa atas penghapusan mural, khususnya aparat, sebagai penjelasan dan konteks atas kritik yang dilontarkan oleh narasumber yang kontra dengan penghapusan mural oleh aparat sebagai unsur utama dalam berita.

Analisis yang terakhir yaitu struktur retorik pada kategori pertama, Tempo.co banyak menggunakan kata-kata seperti “represif” untuk menggambarkan sikap aparat yang melakukan penghapusan mural serta kata “kegelisahan” untuk menggambarkan perasaan yang dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi, sehingga mural menjadi pelampiasan yang menurut Tempo.co seharusnya dapat dipahami oleh pemerintah dan aparat. Tempo.co juga menggunakan kata “privilege” untuk membandingkan antara aksi mural oleh masyarakat dengan kampanye politik yang identik dengan penggunaan ruang public sebagai medium penyalur pesan, tetapi berbeda perlakuan karena *privilege* yang menurut Tempo.co dimiliki oleh para politisi.

Pembelaan Tempo.co terhadap maraknya mural kritikan melalui rujukan sejarah mural dan UU Kebebasan Berekspresi

Pada kategori ini, pembelaan Tempo.co terhadap aksi mural dapat ditinjau melalui rujukan yang dipilih oleh Tempo.co, yaitu sejarah mural dan UU Kebebasan Berekspresi. Berita yang membahas seputar sejarah mural berjudul “Viral Mural 404 not found, Ternyata Mural Sudah Ada Sejak Puluhan Ribu Tahun Lalu”

dimana Tempo.co terlihat berusaha menormalisasi aksi mural karena eksistensinya yang memiliki sejarah panjang sebagai salah satu medium berekspresi umat manusia. Tempo.co juga menerbitkan berita yang membahas aksi mural melalui perspektif hukum berupa UU Kebebasan Berekspreasi melalui berita yang berjudul “Viral Mural 404 Not Found, Ini Bunyi Pasal UU Menjamin Kebebasan Berekspreasi” yang di dalamnya membahas dan menyertakan isi pasal yang menurut Tempo.co dapat digunakan sebagai acuan perlindungan aksi mural oleh masyarakat.

Ditinjau dari struktur skrip-nya, unsur *what* dan *how* ditonjolkan oleh Tempo.co. Seperti pada berita berjudul “Viral Mural 404 not found, Ternyata Mural Sudah Ada Sejak Puluhan Ribu Tahun Lalu” dimana unsur *what* menjadi kekuatan karena berita tersebut memberikan informasi bernuansa *feature news* mengenai sejarah panjang mural yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Berita selanjutnya berjudul “Viral Mural 404 Not Found, ini Bunyi Pasal UU Menjamin Kebebasan Berekspreasi” yang berisi penjelasan terkait payung hukum kebebasan berekspresi yang dapat diimplementasikan untuk perlindungan aksi mural berupa UUD 1945 Pasal 28E ayat 2 dan ayat 3, serta Pasal 28F.

Secara tematik, Tempo.co lebih menyiratkan membenaran terhadap aksi mural melalui narasi yang ada di dalam kedua berita tersebut. Berita pertama membahas seputar sejarah mural secara mendalam, mulai dari sejarah, hingga perkembangan tekniknya. Kemudian pada berita kedua juga membahas secara mendalam seputar UU yang mengatur kebebasan berekspresi sebagai respon Tempo.co atas penghapusan mural oleh aparat dalam peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi.

Salah satu struktur retorik yang menonjol dalam kategori ini adalah penggunaan kata “ternyata” pada judul berita “Viral Mural 404 not found, Ternyata Mural Sudah Ada Sejak Puluhan Ribu Tahun Lalu” yang seakan terlihat bahwa

Tempo.co berusaha menjawab narasi dan anggapan jika mural sebagai bentuk karya atau alat kritik yang baru.

Tempo.co menampilkan cerita mendalam dari dua peristiwa aksi mural melalui perspektif pembuat mural dan warga

Kategori ini berisi pemberitaan Tempo.co yang mengangkat cerita mendalam dari dua peristiwa aksi mural melalui perspektif pembuat mural dan warga. Secara sintaksis, Tempo.co merancang berita berjudul “Cerita Mendalam di Balik Mural Tuhan Aku Lapar” melalui perspektif warga yang tidak mempersoalkan mural serta perspektif pembuat mural secara langsung untuk mengetahui motif serta tujuan pembuat mural *Tuhan Aku Lapar*. Tempo.co juga memberikan ruang bagi gerakan Gejayan Memanggil dalam berita berjudul “Gejayan Memanggil Gelar Lomba Mural Dibungkam, Sindir Aparat dan Baliho Politik”, di mana gerakan Gejayan Memanggil merupakan sebuah gerakan atau wadah masyarakat yang seringkali melakukan demonstrasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Secara skrip, kedua berita tersebut memenuhi kelengkapan unsur berita dengan menonjolkan unsur *who* berupa sosok pembuat mural *Tuhan Aku Lapar* dan gerakan Gejayan Memanggil yang menjadi narasumber, serta unsur *what* yaitu topik berita mengenai cerita mendalam aksi mural *Tuhan Aku Lapar* dan Gejayan Memanggil yang merespon tindakan penghapusan mural oleh aparat.

Dilihat dari struktur tematiknya, Tempo.co merancang narasi di dalam berita yang pertama yang berasal dari perspektif warga yang tidak mempersoalkan mural *Tuhan Aku Lapar* dan pembuat mural, sehingga narasi yang terkandung di dalam berita tentunya berisi membenaran terhadap aksi mural *Tuhan Aku Lapar*. Pada berita kedua, narasi yang ditampilkan oleh Tempo.co adalah Gerakan Gejayan Memanggil yang berencana mengadakan lomba mural sebagai respon dari penghapusan mural oleh aparat di berbagai daerah, sekaligus kritik

Gejayan Memanggil terhadap aparat yang dinilai terlalu berebihan dan represif terhadap aksi mural oleh masyarakat.

Struktur retorik yang menonjol berupa Tempo.co yang menuliskan kata “dibiarkan” yang mengacu pada dinding kosong yang sebelumnya digunakan sebagai kanvas mural *Tuhan Aku Lapar* yang pada akhirnya seakan dibiarkan kosong oleh para pemural, padahal para pemural dikenal tidak akan membiarkan dinding kosong dan dimanfaatkan sebagai kanvas mural apabila tidak ada tindakan penghapusan mural oleh aparat.

Keberimbangan yang berusaha ditampilkan oleh Tempo.co melalui perspektif pihak pemerintahan

Tempo.co berusaha menampilkan keberimbangan dengan menerbitkan berita yang berjudul “Mural 404 Not Found Dihapus, Moeldoko: Jangan Sembarangan Menggambar” dengan narasumber yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan pola pemilihan narasumber pada pemberitaan yang lain. Kali ini Tempo.co menampilkan sosok Moeldoko, seorang Kepala Staf Kepresidenan yang praktis diaduk sebagai perwakilan dari pihak Pemerintah, yang menyatakan agar kritik harus dilakukan secara beradab, menyindir kritik lewat mural *404 not found* yang dianggap melecehkan Presiden Jokowi yang menurutnya merupakan sosok simbol negara yang harus dihormati.

Unsur *who* berupa sosok Moeldoko ditonjolkan oleh Tempo.co untuk menunjukkan praktik keberimbangan yang ditunjukkan.

Dari struktur tematiknya, keseluruhan berita berisi pernyataan Moeldoko tentang penyampaian kritik yang menurutnya seharusnya dilakukan secara beradab dan menghormati Presiden, dan setiap kutipan Moeldoko juga diberikan penjelasan oleh Tempo.co.

Tempo.co menampilkan istilah “orang timur” sebagai penonjolan struktur retorik yang mengacu pada standar kesopanan masyarakat Indonesia yang seharusnya tidak melakukan kritik secara

melewati batas-batas etika dan adat kesopanan, sebagai penjelasan dari pernyataan Moeldoko.

2. Media Indonesia

Terdapat 8 berita yang diterbitkan oleh Media Indonesia dalam peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Pemberitaan pada periode 12 Agustus – 01 September 2021 tersebut terbagi menjadi tiga kategori.

Penyebutan kata Pelecehan oleh Media Indonesia pada berita mural 404 not found

Dilihat dari struktur sintaksisnya, pada isu pertama yaitu pelabelan pelecehan terhadap aksi mural *404 not found*, Media Indonesia menyebutkan kata “pelecehan” yang ditampilkan sejak dari judul berita. Pelabelan “pelecehan” ditujukan kepada pembuat mural yang dianggap melakukan pelecehan terhadap Presiden Jokowi karena telah membuat mural bergambarkan wajah mirip Presiden Jokowi yang ditutupi tulisan *404 not found*. Terdapat 2 berita dengan judul yang mengandung kata “pelecehan”, yang pertama adalah berita berjudul “Polisi Selidiki Pelecehan Mural Mirip Wajah Presiden RI Jokowi” dimana berita tersebut memuat pelaksanaan penyelidikan oleh kepolisian terhadap mural *404 not*, dan berita kedua berjudul “Polisi Hapus Pelecehan Mural Mirip Jokowi” menjadi berita yang memuat informasi penghapusan mural *404 not found* oleh aparat, dimana alasan utama penghapusan mural *404 not found* yang diungkapkan oleh pihak Kepolisian adalah karena menganggap Presiden Jokowi merupakan simbol negara yang tidak boleh dilecehkan. Dari dua berita tersebut, Media Indonesia secara terang-terangan melanggengkan stigma terhadap pembuat mural kritis sebagai aksi pelecehan, dalam hal ini adalah mural *404 not found* yang dianggap melecehkan Presiden Jokowi.

Secara skrip, unsur *how* ditonjolkan dalam berita berupa pernyataan polisi yang memberikan penjelasan mengenai penyelidikan mural *404 not found* karena dianggap mengandung pelecehan.

Secara tematik, Media Indonesia banyak memberikan porsi terhadap aparat di dalam berita untuk menjelaskan alasan di balik penghapusan mural tersebut.

Ditinjau dari struktur retorisnya, kata “pelecehan” yang ditampilkan oleh Media Indonesia pada dua judul berita hingga isi berita menunjukkan usaha propaganda sekaligus penegasan dari Media Indonesia untuk membuat pembaca memiliki pemahaman bahwa mural *404 not found* merupakan mural yang mengandung pelecehan terhadap Presiden Jokowi.

Framing Media Indonesia yang mengglorifikasi Penghapusan Mural

Media Indonesia menerbitkan empat berita yang diklasifikasikan dalam kategori ini. Dilihat dari struktur sintaksisnya, berita berjudul “Mural Kami Lapar Tuhan di Tanah Abang Dihapus Warga” yang memuat tuduhan terhadap warga sebagai pihak yang menghapus mural pada judul berita. Namun penyebutan tersebut menimbulkan ambiguitas karena di dalam berita, Media Indonesia tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti penghapusan mural Kami Lapar Tuhan oleh warga, melainkan mengambil penjelasan dari pihak keamanan mengenai alasan penghapusan mural. Dari berita tersebut menunjukkan bahwa Media Indonesia tidak bertanggung jawab atas penyebutan warga sebagai pihak yang menghapus mural Kami Lapar Tuhan pada judul berita, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan persepsi yang salah hingga menimbulkan tuduhan serius terhadap warga.

Pada dua berita selanjutnya yang berjudul “Mural Mirip Presiden Jokowi Dihapus” dan “Pemkot Jakpus akan Hapus Mural Kami Lapar Tuhan di Kebon Kacang”, terdapat kemiripan yaitu kekuatan *lead* berita yang dimanfaatkan untuk membingkai penghapusan mural. Pada berita pertama, Satpol PP Bandung menyatakan bahwa penghapusan mural mirip Presiden Jokowi akhirnya dihapus karena alasan mural yang dianggap sebagai tindakan *vandalisme*. Pada berita kedua, *lead* berita juga menjadi kekuatan

untuk menonjolkan alasan penghapusan mural oleh Pemkot Jakpus, yaitu karena mengandung muatan yang dinilai tidak menididik masyarakat.

Berita terakhir berjudul “Ridwan Kamil: Seniman Mural Jangan Baper” dimana Media Indonesia memanfaatkan judul berita untuk menonjolkan identitas narasumber beserta pernyataannya terkait pemural agar jangan *baper* jika muralnya dihapus, karena mural dianggap sebagai karya seni yang bersifat sementara. Media Indonesia terlihat lebih memilih narasumber hingga latar informasi yang berasal dari pihak yang berkuasa atas penghapusan mural mural, seperti aparat dan pejabat, tanpa memberikan porsi pemberitaan bagi pemural. Hal tersebut menegaskan bahwa Media Indonesia berada di pihak yang mengglorifikasi penghapusan mural dalam pemberitaannya.

Unsur *who* menjadi kekuatan, berupa narasumber yang dipilih oleh Media Indonesia dalam empat berita berasal dari pihak yang berkuasa atas penghapusan mural, seperti Polisi dan pejabat.

Struktur tematik banyak berisi penjelasan mengenai alasan penghapusan mural oleh aparat. Kalimat-kalimat yang digunakan oleh Media Indonesia pun mendukung pernyataan dari narasumber yang menjelaskan terkait alasan penghapusan mural.

Dalam struktur retorik yang digunakan Media Indonesia, terdapat penggunaan kata “menetralisir” yang mengacu pada alasan penghapusan mural menurut aparat sebagai siasat untuk mengurangi dampak provokatif bagi masyarakat. Selain itu terdapat pelabelan terhadap aksi mural dengan menggunakan kata “*vandalisme*” yang menurut kbki memiliki makna perbuatan merusak dan menghancurkan. Penyebutan kata *vandalisme* oleh Media Indonesia merupakan penegasan dari pernyataan Satpol PP Bandung yang juga mengungkapkan label serupa terhadap mural mirip Jokowi. Kemudian juga terdapat kata “batasan” yang mengacu pada opini narasumber, yaitu Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang memberikan

batasan terhadap muatan kalimat dalam mural yang menurutnya seharusnya memuat kalimat bernuansa positif.

Keberimbangan yang berusaha ditampilkan oleh Media Indonesia

Terdapat 2 berita yang dapat dilihat dari struktur sintaksisnya. Berita pertama berjudul “Polri: Mural “Jokowi 404: Not Found” Sah-sah Saja, Jangan Ditindak” dimana berita tersebut memuat pernyataan Polri terhadap anggotanya agar tidak lagi menindak mural secara berlebihan. Polri dalam berita tersebut mengungkapkan bahwa permintaan agar tidak menindak mural tersebut berasal dari Presiden Jokowi yang merespon mural oleh masyarakat sebagai kritikan dan masukan. Berita kedua berjudul “Aparat Diminta tidak Berlebihan Merespons Kritik Masyarakat” dimana dalam berita tersebut, Media Indonesia menjadikan Amnesty Indonesia sebagai sumber informasi yang mengkritisi tindakan aparat dalam merespon mural kritikan. Berita tersebut terbit setelah diterbitkannya berita pernyataan Polri yang menyatakan agar jangan menindak mural kritikan oleh masyarakat. Sebelum berita pernyataan Polri terbit, Media Indonesia banyak menerbitkan pemberitaan yang mengglorifikasi penghapusan mural oleh aparat seperti yang telah dijabarkan di atas, sehingga keberimbangan Media Indonesia baru terjadi setelah terbitnya berita yang memuat pernyataan Polri. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Media Indonesia dalam membuat suatu pemberitaan terkesan sejalan dan menyesuaikan dengan kemauan pemerintah atau kekuasaan.

Struktur skrip yang terkandung pada kedua berita telah lengkap, dengan unsur *who* juga menjadi kekuatan, yaitu Polri yang menyatakan agar anggotanya tidak lagi melakukan tindakan terhadap mural, dan Lembaga Amnesty Indonesia yang mengkritik tindakan penghapusan mural oleh aparat sebagai bentuk kemunduran kebebasan berekspresi.

Pemberitaan pada kategori ini tidak memuat glorifikasi Media Indonesia terhadap penghapusan mural seperti kategori sebelumnya.

Kategori ini memuat struktur tematik berupa keberimbangan yang ditampilkan oleh Media Indonesia melalui penjelasan Polri mengenai imbauan kepada anggotanya agar mematuhi perintah untuk tidak menindak mural secara berlebihan, serta pembelaan Amnesty Indonesia terhadap aksi mural yang dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh regulasi hukum di Indonesia.

Terdapat penggunaan kata “tidak berlebihan” sebagai struktur retorik yang ditonjolkan oleh Media Indonesia, mengacu pada tindakan aparat dalam merespon maraknya mural. Kata tersebut memiliki makna tersirat jika sebelumnya aparat telah melakukan tindakan yang dianggap berlebihan, seperti menghapus mural.

PEMBAHASAN

Peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi merupakan bentuk pelampiasan ekspresi masyarakat yang mengalami krisis akibat pandemi. Terlihat dari muatan pesan dalam mural yang benuansa kegelisahan, seperti “Kami Lapar Tuhan”, “Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan”, hingga kritikan terhadap Presiden Jokowi yang perannya dianggap tidak mampu meminimalisir krisis akibat pandemi dengan munculnya mural berwajah mirip Jokowi yang ditutupi kalimat *404 not found* yang berarti tidak ditemukan. Namun aksi mural oleh masyarakat diwarnai dengan penghapusan mural oleh aparat karena berbagai alasan, seperti dianggap sebagai pelecehan, hingga memuat nilai yang dapat memprovokasi masyarakat. Dalam penelitian yang berjudul “Kebebasan Bereksresi Seni Mural Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis”, penghapusan seni mural yang terus berlanjut akan dapat mencederai asas kebebasan berkesenian yang termasuk ke dalam bentuk kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E dan 28F (Firnanda, 2022).

Isu terancamnya kebebasan berekspresi akibat penghapusan mural oleh aparat menjadi topik

yang menarik untuk diperhatikan, mengingat seiring bertambahnya waktu, isu kebebasan berekspresi memiliki relevansi dengan perkembangan kehidupan, karena menyangkut sejauh mana keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, media berperan penting sebagai medium penyalur informasi hingga bertindak sebagai pengawas kekuasaan (Adiyana, 2017). Oleh karena itu penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedua media, Tempo.co dan Media Indonesia dalam membingkai peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemic yang di dalamnya terdapat isu terancamnya kebebasan berekspresi.

Berdasarkan hasil analisis teks berita di kedua media, yaitu media Tempo.co dan Media Indonesia mengenai pemberitaan mengenai maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi, dapat diketahui bahwa kedua media tersebut melakukan pembedaan yang berbeda. Dari hasil analisis juga dapat ditemukan gambaran bagaimana kedua media tersebut melakukan pembedaan dalam pemberitaannya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa institusi media melakukan pembedaan berita untuk menghasilkan pemberitaan yang sesuai dengan ideologi dan aspek lain yang memengaruhi perusahaan media.

Judul berita banyak dimanfaatkan oleh Tempo.co untuk menampilkan sosok *opinion leader*, sosok yang opininya dianggap memiliki kekuatan untuk memengaruhi masyarakat (Valente & Pumpuang, 2007).

Pemberitaan Tempo.co juga banyak bernuansa pembelaan Tempo.co terhadap aksi mural melalui unsur berita yang memuat sejarah mural hingga kebebasan berekspresi. Tempo.co memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan pembelaan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat salah satunya melalui kritiknya dalam Koran Tempo.co terhadap pemerintah yang dianggap terlalu membatasi kebebasan berpendapat masyarakat

khususnya di dunia digital (Sudiana & Muhazir, 2021).

Media Tempo.co membingkai peristiwa maraknya mural kritikan yang disertai dengan isu ancaman terhadap kebebasan berekspresi akibat penghapusan mural oleh aparat dengan mengedepankan pemberitaan yang bernuansa membela aksi mural kritikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap Tempo.co yang cukup kritis dalam pemberitaan mengenai peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi selaras dengan rekam jejaknya sebagai media yang dikenal kritis dalam pemberitaan yang berkaitan dengan isu pemerintah dan publik. Tempo.co menunjukkan keberpihakannya kepada publik melalui pemberitaannya yang menonjolkan isu kebebasan berekspresi dalam mural. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan bahwa Tempo.co dalam pemberitaannya cenderung tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik media, tetapi tetap mengedepankan independensi ruang redaksi demi kepentingan masyarakat (Nurhajati & Wijayanto, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, Media Indonesia cenderung sejalan dengan pemerintah ketika memberitakan suatu isu yang berkaitan dengan pemerintah (Syifa, 2017). Kepentingan pemilik media yang dekat dengan pemerintah ditengarai menjadi salah satu unsur yang memengaruhi pembedaan yang dilakukan oleh Media Indonesia.

Media Group, grup media yang menaungi Media Indonesia mengalami proses pengaruh konglomerasi, salah satunya menjadikan perusahaan medianya, termasuk Media Indonesia sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menyalurkan kepentingan Surya Paloh untuk membangun citranya sekaligus partai politiknya, Partai Nasdem (Fahrudin, 2013). Partai Nasdem merupakan salah satu partai koalisi pemerintah yang sedang berkuasa pada saat terjadi peristiwa maraknya aksi mural kritikan, sehingga hal tersebut ditengarai menjadi penyebab Media Indonesia banyak mengglorifikasi penghapusan mural dalam pemberitaannya. Media Indonesia

memberitakan peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi dengan mengedepankan narasi glorifikasi penghapusan mural melalui pemilihan narasumber yang berasal dari sosok yang berkuasa atas penghapusan mural, hingga pelabelan aksi mural sebagai aksi pelecehan. Hal tersebut membuktikan bahwa kepentingan pemilik media dapat memengaruhi produk jurnalistik suatu media massa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis framing maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemic di media Tempo.co dan Media Indonesia, dapat disimpulkan bahwa suatu media memang melakukan pembingkai berita atas suatu realitas peristiwa di dalam berita. Melalui model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, pembingkai berita oleh Tempo.co dan Media Indonesia dapat dilihat dari cara wartawan menyusun berita (sintaksis), cara wartawan menyusun fakta (skrip), cara wartawan menulis fakta (tematik), dan cara wartawan menekankan fakta (retoris). Hal tersebut menjadi bukti bahwa wartawan dan redaksi media menjadi pihak yang terdepan dalam hal pembingkai berita mengenai suatu realitas peristiwa.

Pengaruh kepentingan yang dilatarbelakangi oleh kepemilikan dan konglomerasi media memiliki dampak besar terhadap keberpihakan media yang kemudian juga berdampak ke dalam pembingkai berita mengenai suatu realitas peristiwa. Media Indonesia sebagai media yang berada di bawah naungan Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh, seorang politisi Partai Nasdem yang dekat dengan pemerintah cenderung membingkai peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah dengan glorifikasi penghapusan dan pelabelan terhadap aksi mural. Sedangkan pada media Tempo.co, aspek kepemilikan media juga dapat dikatakan memengaruhi pemberitaan Tempo.co dalam pembingkai peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah pada masa pandemi. Namun pengaruh kepemilikan media yang ada dalam

Tempo.co berbeda dengan Media Indonesia. Goenawan Mohamad, pemilik Tempo.co tidak memiliki kepentingan yang bersinggungan dengan pemerintah, sehingga Tempo.co dapat dengan leluasa menerbitkan pemberitaan yang bernuansa mengkritisi penghapusan mural hingga pembelaan terhadap aksi mural oleh masyarakat.

Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya agar meneliti pemberitaan mengenai isu pengesahan RUU KUHP yang menuai pro kontra masyarakat karena terdapat isu ancaman terhadap kebebasan berependapat dan berekspresi di dalamnya
2. Bagi Pemerintah agar lebih terbuka lagi terhadap kritikan oleh masyarakat dalam bentuk apapun demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia
3. Bagi Media Massa secara umum agar menerapkan independensi media, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan pemilik media dan dapat menghadirkan pemberitaan yang objektif
4. Bagi Tempo.co agar mempertahankan kredibilitas dan konsistensinya sebagai media yang memiliki rekam jejak media kritis dan keberimbangan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan pemerintah
5. Bagi Media Indonesia agar meminimalisir kepentingan pemilik media secara personal demi kepentingan independensi media dan manfaat yang diperoleh masyarakat
6. Bagi pembaca agar dapat memilah dan mengkritisi terpaan pemberitaan oleh media massa, mengingat banyak aspek yang memengaruhi produk jurnalistik yang dihasilkan oleh media massa

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahro, M. N., & Dewi, P. R. (2018). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di

- Kompas.com, Tempo.co, dan Republika.co.id. *Commercium*, 1.
- Barker, C. (2006). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Baum, M. A., & Potter, P. B. (2008). The Relationships Between Mass Media, Public Opinion, and Foreign Policy: Toward a Theoretical Synthesis. *Annual Review of Political Science*, 39-65. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060406.214132>
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Castells, M. (2014). The impact of the internet on society: a global perspective. *Change*, 127-148.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., & Clark Plano, V. L. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The Counseling Psychologist*, 236-264. doi:<https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- D'Angelo, P., & Kuypers, J. A. (2010). *Introduction: Doing News Framing Analysis*. Routledge.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Fahrudin, D. (2013). Konglomerasi Media: Studi Ekonomi Politik Terhadap Media Group. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(1), 82-97.
- Firnanda, A. (2022). Kebebasan Berekspresi Seni Mural Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis . *Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Idris, M., & Ilyas, A. (2020). PERBANDINGAN BERITA HEADLINE CALON PRESIDEN JOKO WIDODO PADA KORAN HARIAN NASIONAL KOMPAS DAN KORAN HARIAN NASIONAL MEDIA INDONESIA (Tinjauan Analisis Framing). *STIMULI Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 1(2).
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kusumastuti, R. C., Nabila, S., Bhakti, A. Y., Luckyashadi, D. D., Rahman, M. R., & Nastiti, H. (2020). *Media Kiblat Baru Politik Indonesia*. Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligencia Media (Intrans Publishing Group).
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhajati, L., & Wijayanto, X. A. (2019). Kepemilikan Media dan Isi Pemberitaan Koran Tempo. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1, 1-14. doi:DOI: <https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.1>
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 55-75. doi:<https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963>
- Schultz, J. (1998). *Reviving the fourth estate: Democracy, accountability and the media*. Cambridge University Press.
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 185-194.
- Severin, W. J. (2011). *Teori komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sofian, A., & Lestari, N. (2021). Analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 (Analisis framing model Robert N. Entman pada media online Koran Tempo.co Edisi Maret 2020). *Commicast*, 2(1), 58-70.
- Sudiana, Y., & Muhazir, A. (2021). Makna Tahun Represi Digital Dalam Cover Koran Tempo. *AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2 (2), 63-74.
- Syifa, T. N. (2017). Analisis framing pemberitaan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia di Harian Kompas, Republika, dan Media Indonesia. *Bachelor's thesis*,

- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Tempo, T. B. (2013). *Cerita di Balik Dapur Tempo*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Valente, T. W., & Pumpuang, P. (2007). Identifying Opinion Leaders to Promote Behavior Change. *Health education & behavior*, 34 (6), 881-896. doi:<https://doi.org/10.1177/1090198106297855>
- Wicaksono, A. (2002). *Identitas dan Budaya Massa: Aspek-Aspek Seni Visual di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Seni Cemeti.

